

**PANDANGAN SIYASAH TERHADAP TRANSFORMASI  
PERAN TEUNGKU DAYAH DALAM PERPOLITIKAN ACEH  
PASCA PERDAMAIAN HELSINKI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**JENIUS KHADAFI**  
**NIM. 04370073**

**DOSEN PEMBIMBING:**

1. **DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**
2. **SUBAIDI, S.AG. M.SI**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Konflik yang berkepanjangan membuat Aceh kerap menjadi perbincangan di berbagai *event* global dan selalu menarik untuk dikaji. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia atau lebih dikenal dengan Perdamaian Helsinki, salah satu amanahnya adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dimana khusus untuk Aceh dalam Pilkada 2006 dibolehkannya hadir calon Independen (kandidat non partai) bagi pimpinan daerah dan juga adanya pembentukan Partai Lokal untuk Pemilu legislatif 2009. Sebagai salah satu kelompok penting dalam masyarakat Aceh, Teungku Dayah ikut mengambil bagian dalam dunia ini yaitu keterlibatannya dalam politik praktis, baik dalam Pilkada Aceh 2006, Pemilu legislatif Aceh 2009, maupun dalam Pilpres Indonesia 2009. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini memfokuskan permasalahan pada: 1) Bagaimana peran Teungku Dayah dalam dinamika perpolitikan di Aceh pasca perdamaian Helsinki dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya transformasi peran tersebut? dan 2) Bagaimana pandangan siyasah terhadap transformasi peran Teungku Dayah dalam politik di Aceh pasca perdamaian Helsinki?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan yakni dengan wawancara langsung dengan informan untuk usaha memahami realitas transformasi peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Historis*, dimana penulis melihat lebih jauh sejarah peran ulama dan Teungku Dayah dalam masyarakat Aceh, kemudian di korelasikan dengan transformasi peran mereka dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki. Setelah data-data terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *deskriptik analitik* dengan proses berpikir secara deduktif maupun induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa transformasi peran Teungku Dayah terhadap keterlibatannya dalam politik di Aceh pasca perdamaian Helsinki tak lain karena kalangan Dayah melihat penyelenggaraan syari'at Islam (SI) di Aceh belum membuahkan hasil yang memadai atau dapat dikatakan masih jalan di tempat, kalangan Teungku Dayah selama ini merasa ditekan, dimarginalkan, bahkan terkesan dianaktirikan oleh pemerintah, Teungku Dayah tidak ada peran secara substansi. Kedekatan Teungku Dayah yang sangat intim dengan masyarakat Aceh kehadirannya sangat dinanti di setiap wilayah yang dipengaruhinya karena mereka dinilai kelompok yang sangat mampu untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh.

Al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah fundamen (*ashlu*) dan kekuatan politik adalah penjaganya. Untuk menjaga agama dari kehancuran maka dibutuhkan suatu kekuatan politik. Kekuatan politik takkan mampu menjaga agama kalau tidak diisi oleh orang-orang yang memahami agama. Landasan inilah yang diambil kelompok Teungku Dayah untuk terjun dalam ranah politik, semuanya adalah bagian dari keinginan besar kalangan Dayah dalam mewujudkan syari'at Islam di Aceh secara kaffah.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Jenius Khadafi  
Lamp : -

Kepada:  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jenius Khadafi  
NIM : 04370073  
Judul : **Pandangan Siyasah Terhadap Transformasi Peran  
Teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian  
Helsinki**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Rajab 1431 H  
20 Juni 2010 M

Pembimbing I

**Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag**  
NIP. 19681020 199803 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Jenius Khadafi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jenius Khadafi

NIM : 04370073

Judul : **Pandangan Siyasah Terhadap Transformasi Peran  
Teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian  
Helsinki**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Rajab 1431 H

20 Juni 2010 M

Pembimbing II

**Subaidi, S.Ag. M.Si**

NIP. 19750517 200501 1 004





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/ DS/ PP. 00.9/34/ 2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Pandangan Siyasah Terhadap Transformasi Peran Teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Jenius Khadafi

NIM : 04370073

Telah dimunaqasyahkan pada: 09 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**Tim Munaqasyah**

Ketua,

  
**Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag**

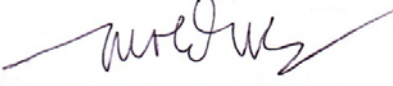
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

  
**Drs. H. Kamsi, MA**

NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

  
**H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.**

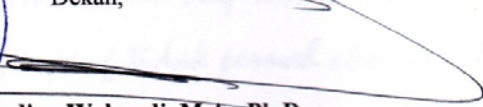
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 09 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan,

  
**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**

NIP. 19600417 198903 1 001



## MOTTO

*Aku tak sehalipun mau memikirkan  
Apa yang tidak pernah aku inginkan  
Tapi  
Aku selalu siap untuk menghadapi  
Apa yang tidak pernah aku pikirkan*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

***Aku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:  
Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Drs. Nasrullah dan Ibunda Harsuni S.Pd  
Kakak2 dan adik2ku, kak Uspur, kak Uswah, dek Pia, dan dek Ami  
Terkhusus buat Adoeku Tersayang Inong Arina  
Serta semua keluarga besarku di Atjeh***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله

إلا الله و أشهد أن محمّدًا رسول الله. اللهم صلّ و سلّم على محمّد و على آله

وصحبه أجمعين, أمّا بعد.

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Iman dan Islam.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dengan judul: **“Pandangan Siyasa Terhadap Transformasi Peran Teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki”** ini, sebuah pembahasan yang melihat sisi lain mengapa terjadinya transformasi peran yang dilakukan Teungku Dayah dalam perpolitikan di Aceh pasca perdamaian yang selama ini banyak dibicarakan dan dipertanyakan orang, dan bagaimana pandangan siyasa terhadap peran Tengku Dayah tersebut.



Selanjutnya dengan selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai rasa takzim, izinkanlah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, dan Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing, dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi, memberi masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi suatu tulisan yang berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai bapak.
3. Kedua orang tuaku; Drs. Nasrullah IBA dan Harsuni S.Pd, yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang kepada penulis.
4. Orang yang akan selamanya aku sayangi, Inong Arina S.Ip, yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka, ini semua adalah pembuktian.
5. Kakak-kakak dan adik-adikku: Kak Usfur Ridha (Abang dan Neuk Barra), Kak Uswatul Hasanah, Dek Yulia Usfa dan Dek Ukhwatul Khamisah yang selama ini terus memberi dukungan dan doa untuk penulis.
6. Kepada Tengku-Tengku Dayah yang membantu penulis memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di kota Yogyakarta.

8. Teman-teman Asrama SABENA (kediaman terindah di jogja), Keluarga Aceh Besar Yogyakarta (KABY), Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta, PIA2KN, IKPMD, dan MAPALASKA (Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga), terkhusus teman-teman BC XIX terimakasih atas semua dukungan teman-teman, semoga kita menjadi orang-orang yang hebat.
9. Kepada semua pihak yang selama penyusun menyelesaikan skripsi ini yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semua bantuannya.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi Penyusun maupun para pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah S.W.T, memberikan balasan yang selimpah. Amin.

Yogyakarta, 01 Rajab 1431 H  
14 Juni 2010 M

Penyusun

**Jenius Khadafi**  
NIM. 04370073

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	□	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	□	s (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wawu	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Lambang Vokal

### 1. Syaddah atau *tasydid*

Tanda syaddah atau *tasydid* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydid*. **Contoh:**

متعددة	ditulis	muta'addidah
ربنا	ditulis	Rabbana

### 2. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, maka ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakat al-fītri
------------	---------	----------------

### 3. Vokal pendek

-----	fathah	ditulis	A
-----	kasrah	ditulis	I
-----	dammah	ditulis	U

### 4. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3.	kasrah + ya' mati يم كر	ditulis ditulis	ī Karīm
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

### 5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au qaul

## 6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## 7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
الحديث	ditulis	Al-Hadits
القياس	ditulis	Al-Qiyas

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	As-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams



## 8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furud
السنة أهل	ditulis	Ahl as-Sunnah

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II : ULAMA DALAM MASYARAKAT ACEH .....</b>	<b>25</b>
A. Sejarah Aceh.....	25
B. Periodisasi Peran Ulama dalam Masyarakat Aceh.....	29
1. Ulama Aceh Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam.....	32
2. Ulama Aceh Pada Masa Orde Lama.....	35
3. Ulama Aceh Pada Masa Orde Baru.....	41
4. Ulama Aceh Pada Masa Reformasi.....	45

<b>BAB III : PERANAN TEUNGKU DAYAH DALAM PERPOLITIKAN ACEH PASCA PERDAMAIAN HELSINKI.....</b>	<b>51</b>
A. Peran Teungku Dayah Dalam Menjaga Perdamaian.....	51
B. Peran Teungku Dayah Dalam Politik Praktis.....	58
1. Peran Teungku Dayah Dalam Pilkada Aceh 2006.....	59
2. Keterlibatan Teungku Dayah Dalam Pemilu Legislatif Aceh 2009.....	64
3. Peran Teungku Dayah Dalam Pilpres 2009.....	68
<b>BAB IV : PANDANGAN SIYASAH TERHADAP TRANSFORMASI PERAN TEUNGKU DAYAH DALAM PERPOLITIKAN ACEH PASCA PERDAMAIAN HELSINKI.....</b>	<b>72</b>
A. Faktor-Faktor Transformasi Peran Teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki.....	72
1. Terbukanya Demokrasi Lokal Di Aceh.....	72
2. Formalisasi Syari’at Islam.....	74
3. Teungku Dayah Sebagai <i>Elite</i> Di Aceh.....	81
B. Pandangan Siyasah Terhadap Transformasi Peran teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki.....	90
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Biodata Informa.....	
2. Daftar Pertanyaan.....	
3. Curriculum Vitae.....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Studi- studi sosial tentang *elite* agama lokal di Aceh menunjukkan bahwa Teungku Dayah (kiai dalam sebutan lokal masyarakat Islam Tradisional Jawa) adalah merujuk kepada seseorang yang dianggap dan diakui berpengetahuan agama Islam luas, pemimpin dan lulusan dari Dayah, kharismatik dan memiliki komunitas pengikut yang fanatik (ucapan dan tindakannya diterima dan diikuti tanpa dipertanyakan terlebih dahulu) dan mereka adalah figur yang mempunyai posisi strategis, dan sentral dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Teungku Dayah diakui berpengetahuan dan memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu keislaman sehingga diyakini tidak ada anggota masyarakat lainnya yang sepadan dengan kapasitas keilmuan dan wawasan mereka, kemudian diposisikan sebagai pemegang otoritas tafsir utama bahkan tunggal terhadap berbagai teks keislaman, sehingga tindakan-tindakan Teungku Dayah diikuti secara fanatik, hal ini menjadi kekuatan peran dan pengaruh Teungku Dayah dalam masyarakat Aceh.

Dalam setiap permasalahan rakyat Aceh, ulama dan Teungku Dayah selalu diposisikan di depan, menjadi pemimpin rakyat, tidak hanya pada ranah keagamaan tetapi juga melingkupi wilayah sosial, budaya, dan politik praktis sekalipun, mereka adalah tokoh yang selalu memelopori pembelaan kepentingan

---

<sup>1</sup> Nirzalin Armia, "Krisis Legitimasi Kekuasaan Politik Elit Agama Lokal, Studi Terhadap Teungku Dayah di Aceh Pasca Penerapan Syari'at Islam Tahun 1999-2007," Proposal Desertasi Doktor Universitas Gajah Mada (2009), hlm.1. Desertasi Doktor Universitas Gajah Mada (2007), hlm.1

identitas orang Aceh. Para akademisi dan ulama Aceh menggambarkan perjuangan untuk mengembalikan hukum Islam ke tempatnya yang benar sebagai elemen kunci dalam perjuangan Aceh melawan Belanda dan kemudian melawan pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Pasca kemerdekaan, di akhir tahun 1945 ulama dan pemimpin Aceh menagih janji kepada Soekarno untuk memberikan pengakuan daerah istimewa dan penerapan syariat Islam, Soekarno mengingkari janjinya dan bahkan Aceh dilebur menjadi satu Provinsi dengan Sumatera Utara, pada saat Kongres Ulama Se-Indonesia tahun 1953 di Sumatera Utara, pemimpin Aceh mengutarakan kekecewaannya kepada pemerintah pusat. Setelah kongres tersebut, pemimpin Aceh Tgk. M. Daud Beureueh untuk pertama kali mendeklarasikan dukungannya secara terbuka terhadap berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) setelah Kartosoewiryo memproklamasikan berdirinya NII pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat, kemarahan rakyat Aceh meledak sehingga harus mengangkat senjata untuk mempertahankan hak dan tradisi abadi yang menjadi identitasnya, yang kemudian membuat sebuah gerakan yang selanjutnya lebih dikenal dengan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Perlawanan ini terus berlanjut dengan munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibawah kepemimpinan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang menyebabkan perseteruan politik terus-menerus antara Aceh dan Jakarta.

Konflik yang berkepanjangan, membuat Aceh sekarang kerap menjadi perbincangan di berbagai *event* global. Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aceh. Sungguh melelahkan, bukan hanya pemerintah Indonesia, rakyat Aceh juga telah letih dengan selalu

didera masalah, musibah *Tsunami* yang menimpa Aceh tanggal 26 desember 2004 lalu adalah awal dari terbukanya hati dunia untuk melihat Aceh lebih dekat sekaligus menyaksikan derita rakyat yang begitu panjang. Adalah mukjizat luar biasa bagi rakyat Aceh ketika 15 agustus 2005, sebuah i'tikad baik lahir dari pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk membuat kesepakatan dalam penyelesaian konflik yang telah berlangsung sejak tahun 1976 itu, yang dikenal dengan Perdamaian Helsinki.

Stigma tentang Aceh perlahan-lahan mulai bergeser, dari daerah yang sarat dengan konflik ke wilayah yang mulai bangkit dari ketertinggalan. Dengan tenaga yang selama ini terpendam, Aceh mencoba berlari kencang mengejar masa depan yang lebih cerah, kini Aceh menjadi laboratorium politik yang paling bergengsi di Asia Tenggara, bahkan juga di dunia.

Sebagai sebuah laboratorium politik, sistem demokrasi Aceh terus mulai ditata, sehingga bisa dikatakan menjadi yang terbaik di Indonesia. Ketika daerah lain dalam pemilu masih bertarung dengan partai politik nasional, Aceh adalah daerah pertama di Indonesia yang memiliki partai politik local (PARLOK), Pemilihan kepala daerah yang di daerah lain hanya bisa diikuti wakil dari partai politik, di Aceh bisa diikuti kandidat non partai, Seperti menangnya pasangan Gubernur Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar pada pemilihan kepala daerah Provinsi Aceh 2006. Belakangan, ruang kandidat non partai maju dalam pemilihan kepala daerah sudah pula diberlakukan di seluruh Indonesia. Tapi faktanya membuktikan, Aceh adalah laboratorium utamanya, bukan tidak



mungkin partai lokal yang berlaku di Aceh, kelak juga akan hadir di Provinsi lain di Indonesia.

Dalam berbagai dinamika diatas, dengan kurun waktu yang sangat panjang, tidak akan mungkin konflik Aceh bisa berakhir dan perdamaian bisa berjalan seperti yang diharapkan tanpa dukungan dan peran berbagai kalangan. pemimpin bangsa, akademisi, para tokoh, Ulama, Teungku Dayah dan masyarakat adalah tonggak utama dalam persoalan ini.

Dengan terbitnya Undang-undang RI No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengandung unsur pelaksanaan syari'at Islam (SI) bagi pemeluknya, khususnya dalam pasal penyelenggaraan kehidupan beragama, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam (SI), dan setelah keluarnya Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus, yang didalamnya jelas tercantum posisi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) – Lembaga tempat bernaungnya ulama Aceh- sebagai salah satu lembaga daerah yang setara dengan eksekutif dan legislatif, sekarang peran ulama sangat strategis di Aceh, karena berbicara syari'at Islam merekalah rujukan utamanya. Pertanyaannya, dengan posisi ini mampukah ulama dan kalangan Teungku Dayah mengambil peran dalam mengatasi persoalan dan permasalahan masyarakat Aceh saat ini seperti apa yang telah dilakukan ulama-ulama Aceh terdahulu? Inilah salah satu landasan yang membuat penulis mencoba mengangkat persoalan ini.

Perdamaian Helsinki membuka ruang munculnya partai lokal (PARLOK) pada pemilu legislatif Aceh 2009. Dari 12 partai lokal yang muncul, setelah diverifikasi hanya 6 partai lokal yang bisa maju pada pemilu, keenam partai tersebut adalah partai Aceh (PA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Ini membuktikan betapa besar ruang yang diberikan kepada rakyat Aceh dengan dapat menentukan arah gerakannya sendiri untuk dapat memperoleh cita-citanya yakni terlepas dari diskriminasi dalam segi apapun oleh pemerintah pusat.

Suatu hal yang luar biasa terjadi, salah satu dari keenam partai lokal tersebut adalah partai yang didirikan oleh para Teungku Dayah yang peduli dengan penegakan syari'at Islam di Aceh, partai ini adalah Partai Daulat Aceh (PDA), Ketaatan kepada para guru dan pemimpin Dayah, dan dukungan santri di beberapa daerah di Aceh menjadi modal penting partai ini dalam meraih kesuksesan pada pemilu 2009 di Aceh.<sup>2</sup> Apa yang menyebabkan para Teungku Dayah melakukan transformasi peran dalam politik di Aceh pasca Perdamaian?, selanjutnya sejauhmana efektifitas peran yang diambil para Teungku Dayah ini dalam berpartai dan bagaimana pengaruh mereka ketika menduduki kursi DPRK dan DPRA Aceh?, ini juga yang selalu menjadi tanda tanya di benak penulis sehingga tertarik untuk mengangkat persoalan ini.

---

<sup>2</sup> "Partai Daulat Aceh," [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Daulat\\_Aceh](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Daulat_Aceh), akses 20 April 2010.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini, dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Apa Saja Peran Teungku Dayah Dalam Dinamika Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki Dan Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Transformasi Peran tersebut?
2. Bagaimana Pandangan Siyasah Terhadap Tranformasi Peran Teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki?

## **C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian ini dilakukan adalah :

1. untuk mengetahui dan memahami lebih jauh bagaimana peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki.
2. Untuk mengetahui kenapa terjadinya transformasi peran Teungku Dayah dalam politik di Aceh pasca perdamaian Helsinki.
3. Mengetahui sejauh mana pandangan Siyasah terhadap tranformasi peran teungku dayah dalam perpolitikan aceh pasca perdamaian helsinki.

Adapun mamfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat terpetakannya peran-peran politik yang diambil Teungku Dayah dalam sejarah dinamika politik Aceh, karena dalam konteks ini Teungku Dayah adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat Aceh, selain berperan dalam ranah keagamaan, Teungku Dayah juga berpengaruh dalam wilayah sosial, budaya, dan politik, mereka adalah tokoh yang selalu mempelopori pembelaan kepentingan

identitas orang Aceh, juga sebagai sumbangan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kajian Jinayah Siyasah (hukum pidana dan politik Islam).

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan ini, penulis telah mengkaji beberapa karya ilmiah yang relevan. C. Snook Hungronje dalam “*De Atjeher, deel I en II*”<sup>3</sup> menyimpulkan bahwa: keberislaman masyarakat Aceh yang fanatik telah menjadi landasan tumpu bagi kekuasaan ulama. Studi lainnya yang menarik perhatian ilmuwan sosial tentang hubungan ulama, politik dan masyarakat Aceh diangkat oleh Ibrahim Alfian dalam “*Perang dijalan Allah 1873-1912*” menyatakan bahwa para ulama mempergunakan pusat-pusat pengajian atau Dayah sebagai tempat untuk menggodok pengikut-pengikutnya dan untuk menghimpun kekuatan menghadapi belanda, melalui penyebaran ideologi perang sabil, para ulama berusaha menggugah rakyat menjadi lebih dinamis dalam menghadapi musuh.<sup>4</sup>

Studi tentang Teungku Dayah lainnya di Aceh juga dilakukan oleh M. Isa sulaiman pada tahun 1991-1994 yang memperlihatkan betapa Teungku Dayah terutama pada era Orde lama di Aceh sangat dominan kekuasaannya dalam politik praktis, yang menarik keberadaan mereka dalam politik praktis itu bukanlah sebagai peran instrumen ataupun hanya sebagai pendulang suara semata tetapi justru sebagai pemain utama yang menentukan kebijakan politik dalam berbagai

---

<sup>3</sup> C.snouck hurgeonje, *De Atjeher,deel I en II*, di terjemahkan dalam bahasa indonesia dengan judul “ Aceh di mata kolonialis oleh Ng, Singarimbun dkk. (Jakarta: yayasan soko guru 1985)

<sup>4</sup> Ibrahim Alfian, *Perang dijalan ALLAH 1873-1912* (jakarta : pustaka sinar harapan, 1987) hlm 151

aspeknya. Pada era pemerintahan orde lama, posisi Teungku Dayah dalam pemerintahan sangat dominan di Aceh mereka menjadi Gubernur, ketua DPRD dan ketua partai politik sekaligus.<sup>5</sup> Dominasi kekuasaan Teungku Dayah dalam politik praktis memungkinkan karena mendapat dukungan kuat dari jaringan murid-murid mereka yang ada di berbagai Dayah dan tersebar di seluruh Aceh.

Akhmad Dimiyati dalam skripsinya “Kontribusi Kiai Krpyak Terhadap Partai Politik” yang disusun tahun 2007 lalu menyatakan bahwa: Trend politik kiai krpyak saat ini lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman, dengan kata lain Politik NU merupakan proyek transformasi sosial politik yang terakumulasi dalam perilaku warga NU, termasuk peran politik kiai krpyak, satu sisi parpol mendapat dukungan dari warga NU, disisi lain kiai Krpyak mendapat popularitas kekuasaan. Indikasi lain bahwa parpol memanfaatkan peran kiai, oleh karena itu, kontribusi politik kiai krpyak dalam memperbaiki dan meluruskan sistem di partai politik sangat dibutuhkan”.

Rini Pentania Arifa dalam penelitian skripsinya tahun 2005 tentang “Peran Kiai Dalam Politik di Kabupaten Sumenep Perspektif fiqh Siyasa” mengutarakan bahwa: Banyak orang meyakini kiai sebagai *elite* agama, namun disisi lain kiai telah menunjukkan adaptasinya terhadap perubahan zaman, ia tidak sekedar ada dalam isu-isu agama melainkan juga telah melangkah kedepan memasuki arena yang luas, salah satunya adalah arena politik, dan hal inilah yang menyebabkan kiai terjebak ke dalam konflik *elite* politik dengan posisi sebagai alat kekuasaan,

---

<sup>5</sup> M. Isa Sulaiman, *sejarah Aceh : sebuah gugatan terhadap tradisi*, (Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 1997). hlm. 222

ini dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan kiai dalam memback-up kepentingan politik penguasa, guna mempertahankan kekuasaannya.

Dari berbagai sumber yang penulis sebutkan diatas, banyak literatur membahas tentang Teungku Dayah (kiai dalam sebutan lokal masyarakat Islam tradisional Jawa) dan perannya dalam masa dan kurun waktu tertentu, namun tidak ada satupun yang berbicara tentang peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat topik diatas, agar menjadi tambahan referensi dalam pengkajian peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh itu sendiri.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk membahas tentang pandangan siyasah terhadap transformasi peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca Perdamaian Helsinki, diperlukan seperangkat teori pendukung sebagai landasan konsep yang akan diaplikasikan dalam penelitian. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketimpangan antara tataran konsep dan operasionalisasi di lapangan.

Islam sebagai sistem nilai dan ajaran yang mengandung doktrin universal, pada tingkat sosial senantiasa tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan lain yakni perubahan. Menurut ajaran Islam sendiri perubahan sering di katakan sebagai *sunnatullah*, yang merupakan salah satu sifat asasi manusia, dan alam raya keseluruhan. Semua manusia, kelompok masyarakat, dan lingkungan hidup mereka mengalami perubahan terus menerus, termasuk dalam hal ini mengenai



perubahan peran politik Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki.

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat terus mengalami perubahan, dan perubahan itu menuju pada kemajuan dan pergeseran nilai-nilai lama diganti dengan nilai-nilai baru dengan situasi itu, negara rasional akan menyesuaikan kembali konstitusi, karena setiap rumusan mengenai pengelolaan negara hanya menjangkau ruang dan waktu tertentu. Aturan hukum yang dihasilkan itu akan berguna bagi kehidupan sosial politik dan ekonomi. Bagi negara yang mendasarkan diri pada kehendak Tuhan, segala sesuatunya akan dikembalikan kepada spirit Islam, dan aturan hukum yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bagi semua orang dan akan berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Pandangan politik demikian dikemukakan oleh Ibn Khaldun: “Pemerintahannya terhadap manusia itu ada yang berdasarkan hukum agama yang diturunkan dari sisi Allah, dimana keimanan mereka terhadap pahala dan siksa seperti yang dikemukakan oleh orang yang menyampaikannya, adalah faktor yang menyebabkan mereka patuh kepada hukum itu. Ada pula pemerintahan yang berdasarkan politik rasional yang dipatuhi rakyat karena mereka mengharapkan dari penguasa itu, karena ia mengetahui kepentingan mereka. Pemerintahan pertama berguna bagi dunia dan akhirat, karena *syar’i* mengetahui kepentingan yang sesungguhnya, dan ia menjaga hamba-hamba dalam kehidupan akhirat.<sup>6</sup>

Pemikiran politik Islam secara historis terpetakan dalam tiga periode dari awal terbentuknya pemikiran itu sampai sekarang, yaitu periode klasik,

---

<sup>6</sup> Ibn Khaldun, seperti dikutip oleh A. Rahman Zainuddin, *kekuasaan dan negara*, dalam Pemikiran Politik Islam Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 91

pertengahan, dan kontemporer. Pemikiran politik Islam periode klasik dan pertengahan, melahirkan tokoh-tokoh intelektual semacam Ibn Arabi, al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu khaldun. Secara garis besar teori tentang asal mula timbulnya negara dari enam pemikir Islam itu hampir sama, yaitu tampak sekali pengaruh alam pikiran Yunani yang mencoba dikawinkan dengan alam pikiran Islam. Yang berbeda dengan pemikiran Yunani, para tokoh Islam baik secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohani dan ukhrawi. Ibn 'Arabi (1970), Ghazali (1975) dan Ibnu Taimiyah (1980) dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja, merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Ketiga tokoh ini berpendapat, bahwa khalifah itu adalah khalifah Allah atau bayangan Allah di bumi. Bahkan kekuasaan khalifah, menurut Ghazali, adalah suci (*muqaddas*), dengan pengertian tidak dapat diganggu gugat (Ghazali, 1975). Hal ini berbeda dengan Mawardi, yang menyatakan bahwa seorang kepala negara dapat diturunkan dari tahta, jika tidak mampu lagi memerintah, baik disebabkan oleh alasan jasmani, mental dan akhlaq, meskipun dia tidak menunjukkan bagaimana penurunan itu dilaksanakan (al-Mawardi, 1973). Dan *ketiga*, Ibnu Khaldun berpikiran, bahwa lebih baik menggunakan ajaran dan hukum agama sebagai dasar kebijakan dan peraturan negara daripada hasil ijtihad (rekayasa pemikiran) manusia (Khadun, 1986 : 189).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Anjar Nugroho, *kekuasaan legislative dalam pemikiran politik islam*, <http://pemikiranislam.wordpress.com>, akses tanggal 10 Juli 2010

Sementara para pemikir politik Islam kontemporer di Indonesia yang diwakili antara lain oleh Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, secara umum mereka berpendapat bahwa tidak ada konsep tentang negara Islam. Dan mereka juga sepakat untuk menerapkan secara maksimal nilai moral-etis al-Qur'an dalam mengembangkan sistem sosial dan politik yang lebih egaliter, demokratis, adil dan manusiawi. Nurcholish dan Amien Rais mengungkap pentingnya aktualisasi ajaran-ajaran Islam secara utuh dan konsekuen dalam sistem politik Islam sehingga menciptakan suatu kemashlahatan sebagaimana yang dicita-citakan *as-siyasah asy-Syar'iyah*. Lebih lanjut Kuntowijoyo menawarkan enam kaidah dalam kehidupan bernegara yaitu ; 1) *ta'aruf* (saling mengenal); 2) *syura* (musyawarah); 3) *ta'awun* (kerjasama); 4) *mashlahat* (menguntungkan masyarakat); 5) *'adl* (keadilan); 6) *taghyir* (perubahan).<sup>8</sup>

Tranformasi peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki merupakan suatu langkah yang diambil ulama dayah di Aceh sebagai wujud tanggung jawabnya atas konstruk politik dengan spirit Islam, teori lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teori *culture broker* , teori ini diperkenalkan oleh Clifford Geertz (1960),<sup>9</sup> menunjukkan kiai (mempunyai kedudukan sama dengan *Teungku Dayah* dalam masyarakat Aceh) sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kiai terletak

---

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan,1991) hlm. 91-105

<sup>9</sup> Clifford Geertz, *Abangan, santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa: Terjemahan oleh Aswab Mahasin* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

pada pelaksanaan fungsi makelar ini. Meskipun secara politis kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.<sup>10</sup> Dalam konteks Aceh, peran Teungku Dayah sebagai *culture broker* tidak terlepas dari peran sosialnya sebagai pemimpin Informal dan *elite* agama lokal yang kharismatik.

Kata *elite* merujuk pada setiap individu dalam kelompok sosialnya yang memiliki kemampuan dan pengaruh dominan terhadap isu-isu tertentu sehingga ia menjadi pusat referensi tindakan atau keputusan.<sup>11</sup> Dalam ranah agama terdapat tingkatan yang terbagi pada *elite* agama (pemimpin agama) dan massa agama yang umumnya disebut ummat. Pada masyarakat islam indonesia sebutan terhadap *elite* agama sangat beragam tergantung pada tradisi dan kebiasaan dalam lokalitas masing-masing.

Mill, seorang sosiolog, mengemukakan bahwa *elite* adalah mereka yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer, dan politik,... membentuk kurang lebih *elite* kekuasaan yang terintegrasi dan terpadu yang keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat.<sup>12</sup>

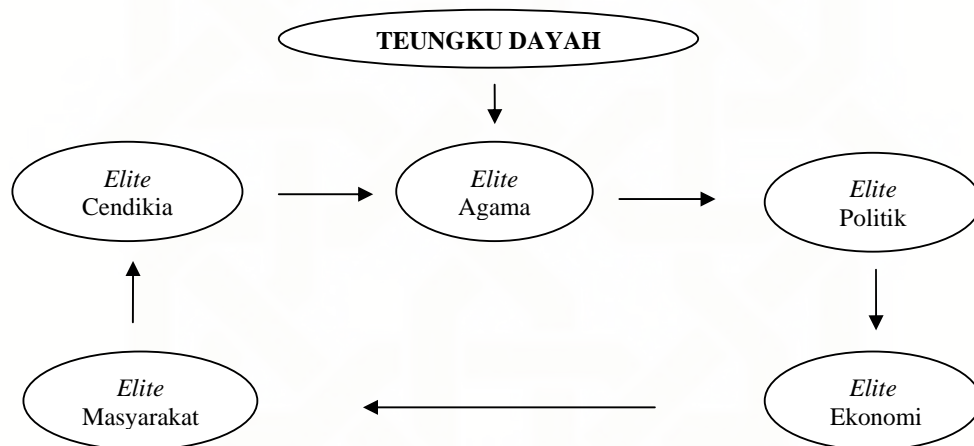
---

<sup>10</sup> Dr. Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia," <http://alip-sragen.blogspot.com/>, akses 22 April 2010.

<sup>11</sup> T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006) hlm. 1

<sup>12</sup> Collin Dictionary of Sociology dalam Syarifuddin Jurdy, *Pemikiran Politik Islam Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar:2008) hlm. 490

Konsep elite yang diperankan Teungku Dayah di Aceh dapat penulis gambarkan pada bagan di bawah ini:



### 1. Peran Sosial Kepemimpinan Informal

Defenisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan suatu komunitas, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa- peristiwa para pengikutnya. Kepemimpinan juga dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela/ sukacita. Ada beberapa faktor yang menggerakkan orang lain yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.

Ketika merujuk pada prinsip kepemimpinan, peran Teungku Dayah di Aceh cenderung bersifat kepemimpinan informal. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari belakang. Pimpinan informal merupakan orang yang tidak mendapatkan pengakuan formal sebagai pemimpin namun karena memiliki kualitas unggul, ia mampu mencapai kedudukan yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku kelompok atau masyarakat.<sup>13</sup> Masalah yang selalu terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah hubungan yang melembaga. Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan formal dan hubungan informal. Efektifitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan seseorang. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan “memikat” hati orang lain.
2. Kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain.
3. Penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak dicapai.
4. Penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam kegiatan kegiatan operasional.
5. Pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain.

---

<sup>13</sup> Kartini Sartono 1982 hal 6, dalam “*peran Teungku Dayah di masyarakat Aceh* “ <http://hardiansyah85.wordpress.com>, akses 22 April 2010.



Kepemimpinan informal lebih kepada persoalan penilaian masyarakat terhadap pribadi tertentu dalam kaitannya dengan sistem sosial yang berlaku. Interaksi yang dinamis antara kedua unsur pribadi dan sistem sosial ini adalah faktor utama yang memampukan kepemimpinan itu. Hal ini berarti bahwa selama pribadi yang disebut pemimpin itu dianggap atau dinilai telah memenuhi kebutuhan dari sistem sosial komunitasnya, maka selama itu ia dapat mempertahankan ikatan emosional dengan para pengikutnya dan selama itu pula kepemimpinannya berlanjut.

Kepemimpinan yang dimiliki Teungku Dayah dapat dikatakan sebagai bentuk pendelegasian dari yang maha kuasa (Allah), karena bagi masyarakat Aceh jabatan yang dimiliki oleh Teungku Dayah tidak datang dari aparat pemerintah, namun jauh daripada itu kepemimpinan tersebut datangnya langsung dari sang *khalik*, *Khalifatun fil Ardhi* merupakan konsep yang selalu dipegang teguh. Bentuk dari pendelegasian tersebut antara lain perintah datangnya dari Allah kemudian melalulai para rasul, seterusnya melalui para ulama karena pada hakikatnya ulama adalah pewaris para Nabi. Barang siapa yang melanggar aturan ulama maka ia juga melanggar aturan Nabi dan seterusnya melanggar aturan Allah berupa murtad. Dan apabila hal itu terjadi maka telah sia-sialah ia menjadi muslim yang sejati.

## **2. Otoritas Kharismatik**

Istilah kharisma akan diterapkan pada suatu mutu yang terdapat pada seseorang, yang kiranya ia terpisah dari orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi dengan kekuasaan atau mutu yang bersifat duniawi, luar

biasa atau sekurangnya kekacauan dalam bidang tertentu, mutu seperti ini menarik para pengikut yang setia kepada pemimpin kharismatik tersebut secara pribadi dan memiliki komitmen terhadap keteraturan normatif atau moral yang digambarkan. Menurut hal ini kepatuhan yang dimiliki para pengikut tergantung baik pada identifikasi emosional dengan pemimpin sebagai seorang pribadi maupun komitmen terhadap nilai-nilai *absolute* yang diajarkannya.

Masyarakat Aceh traditional *religious* pedesaan sangat didominasi oleh pengaruh Teungku Dayah sebagai pemimpin kharismatik. mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini, pengetahuan sebagai faktor penyebab. Karena kurangnya seorang pemimpin yang karismatik, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan *ghaib* (*supranatural power*), sehingga para murid/ santri yang belajar pada Ilmu yang telah diberikan. permasalahan ini tidak hanya berlaku dalam satu Teungku Dayah sangat enggan melawan Teungku karena dikhawatirkan akan “*Teumeurka*” atau laknat dari Teungku yang berakibat tidak diberkahi lingkungan Dayah saja namun juga dalam masyarakat Aceh umumnya.

Sebagai sosok yang kharismatik Teungku Dayah memiliki kekuasaan teologis yang menempatkan kedudukan mereka sangat sentral di tengah-tengah masyarakat Aceh. Max Weber mengatakan, seorang ulama mempunyai pengetahuan yang khusus, doktrin yang pasti dan kualifikasi-kualifikasi yang tertentu pula, sehingga terlihat dengan jelas perbedaannya dengan dukun, nabi, dan kelompok-kelompok fungsionaris agama lainnya. Disamping itu untuk

memperkuat kharisma yang melekat pada dirinya ia senantiasa mengeluarkan wahyu dan hal-hal yang ajaib lainnya.<sup>14</sup>

Dalam gaya kepemimpinan kharismatik para pengikut membuat atribusi (penghubungan) dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-prilaku tertentu. Ikatan evaluatif yang bersifat kepemimpinan ditentukan oleh keberhasilan pemimpin memenuhi harapan sosial terhadap peranannya. Ada dua harapan yang diimbangkan kepada pemimpin yaitu:

1. Kemampuan untuk memimpin kearah tercapainya situasi yang dicitakan komunitasnya.
2. Kemampuan fungsinya dalam mempertahankan komunitas.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini berusaha memahami realitas transformasi peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca Perdamaian Helsinki, studi ini pada dasarnya penelitian kualitatif yang berusaha melakukan deskripsi dan analisa kritis terhadap fenomena yang diteliti dengan tujuan dapat memahami dengan sebaik-baiknya fenomena tersebut. Proses pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dilakukan melalui interpretasi terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang datanya

---

<sup>14</sup> Max Weber, *The sociologi of religion*,(USA : beacon press, 1993) hlm 29.

diperoleh dari lapangan yakni dengan wawancara langsung dengan informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptik analitik*, yaitu sifat penelitian yang didalamnya menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fakta yang seadanya sesuai yang didapatkan di lapangan dari hasil penelitian, namun tetap terfokus pada suatu kejelasan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan *historis*, dimana penulis melihat lebih jauh sejarah peran ulama dan Teungku Dayah dalam masyarakat Aceh, kemudian di korelasikan dengan transformasi peran mereka dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang Penulis ambil dalam penyempurnaan penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori:

### **a. Data Primer**

Data primer terdiri dari pernyataan, sikap, tindakan, pandangan dan lain-lain yang diperoleh dari berbagai pihak (Informan). Untuk mendapatkan data ini penulis akan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan kepada

para informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari Teungku Dayah, Politisi dari kalangan Teungku Dayah, tokoh partai politik dalam hal ini partai daulat aceh (PDA), dan organisasi di tingkat ulama Aceh antara lain Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Rabithah Thaliban Aceh (RTA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Diharapkan dapat terpetakannya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi peran Teungku Dayah dalam politik Aceh pasca perdamaian Helsinki dan mengetahui peran-peran politik yang dilakukannya.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder terdiri dari dokumen baik buku, majalah, literatur, surat kabar, *website*, dan lain-lain yang dianggap dapat mendukung dan memperkaya proses eksplorasi dan pembedahan permasalahan yang diteliti.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, diperlukan adanya teknik pengumpulan data meliputi:

#### **a. Teknik Observasi (pengamatan)**

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung tanpa menggunakan alat ataupun dengan data yang telah dipersiapkan secara khusus terhadap gejala-gejala subjek yang disediakan. Posisi peneliti mengambil sikap diam dan mencermati segala aspek simbolisasi yang

dieksplisitkan oleh subjek yang diamati, khususnya dalam kaitannya dengan permasalahan tema penelitian. Aktivitas ini diharapkan akan mengoptimalkan pengetahuan peneliti terhadap motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar dan kebiasaan subjek penelitian. Dengan demikian, pengamatan yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terutama bertujuan untuk memahami subjek penelitian. Pemahaman ini penting dilakukan terutama untuk mengeksplorasi lebih jauh proses wawancara.<sup>15</sup>

#### **b. Teknik Wawancara**

Disamping observasi, untuk memperoleh data primer penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam (*Indept Interview*), dengan cara memberikan pertanyaan langsung dengan lisan kepada informan, adapun cara dalam memilih informan adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, kompetensi, dan juga memiliki kewenangan/ terkait dengan topik dalam penelitian ini sehingga dapat diperoleh berbagai informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun proses wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, artinya sebagian pertanyaan yang sifatnya umum, pertanyaannya disusun terlebih dahulu sebagaimana dalam sistem

---

<sup>15</sup> Irwan Abdullah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum* (Jakarta: DPPM Dirjen Dikti 2003)

wawancara terstruktur,<sup>16</sup> untuk pertanyaan yang sifatnya khusus disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari, dengan cara ini diharapkan akan terciptanya suasana yang santai (tetapi tetap serius dan fokus pada tema penelitian) bagi informan sehingga dapat memberikan informasi secara leluasa, bebas (tidak ada yang ditakuti sehingga disembunyikan) dan seluas-luasnya.

### **c. Teknik Dokumentasi**

Untuk memperkaya data, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen. Melihat objek penelitian yang penulis susun mencakup permasalahan peran Teungku Dayah di Aceh, karena banyaknya Dayah di Aceh sudah bermakna semakin banyak pula Teungku Dayah disana, serta keterbatasan dana dan waktu penulis di lokasi penelitian, maka dalam penelitian ini penulis tidak melakukan wawancara secara menyeluruh dari semua Teungku Dayah yang ada di Aceh, namun penulis memilih sampel informan yaitu Teungku-Teungku dari Dayah terkemuka di Aceh yang mana ketokohan dan keberadaannya dikenal dalam masyarakat minimal dilingkup Aceh itu sendiri. Informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan ini juga telah banyak dibahas di berbagai media, sehingga untuk memperkaya data penulis juga banyak mengambil data dari berbagai

---

<sup>16</sup> Daftar pertanyaan terlampir.



media tersebut. yakni berupa data-data dari majalah, surat kabar, *website*, laporan-laporan, serta buku-buku yang ditulis atau diterbitkan serta beredar luas di masyarakat. Diantaranya penulis dapatkan dari berita-berita yang diterbitkan koran harian Aceh serambi Indonesia, Pidato Gubernur Aceh pada peresmian dan pelantikan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Surat Keputusan (SK) Majelis Mustasyar Pusat Partai Daulat Aceh (PDA) dan lainnya.

## 6. Analisis Data

Analisa data adalah langkah akhir dari proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian, langkah ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>17</sup>

Setelah data-data terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan di kategorikan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis baik secara deduktif maupun induktif sebagai berikut:

- a. **Deduktif**, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan, sehingga bisa digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang khusus.

---

<sup>17</sup> Lexi J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya 2000) hlm. 103.

**b. Induktif**, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan, sehingga bisa digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis melakukan penelitian di berbagai sumber kemudian mengumpulkan data-data mentah untuk diolah hingga menjadi sebuah tulisan yang kemudian dituliskan untuk menjadi sebuah skripsi, yang mana dalam penyajian data-data baik dari berbagai rujukan atau wawancara penulis klasifikasi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama pedahuluan, yang terkandung di dalamnya Latar belakang masalah, Pokok masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka konseptual yang berisi sejarah Aceh dan uraian singkat bagaimana peran ulama dalam masyarakat Aceh dari masa-kemasa terutama perannya dalam bidang politik.

Bab ketiga menjelaskan dan menerangkan lebih mendalam tentang peranan Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki.

Bab keempat yaitu Analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya trasformasi peran Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca Perdamaian Helsinki dan bagaimana pandangan siyazah terhadap transformasi peran Teungku Dayah tersebut.

Bab kelima penutup, berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi skripsi, termasuk didalamnya saran-saran dan dilengkapi dengan bibliografi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai Pandangan Siyash Terhadap Transformasi Peran Teungku Dayah Dalam Perpolitikan Aceh Pasca Perdamaian Helsinki, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi peran Teungku Dayah di Aceh saat ini untuk tampil dalam kancah politik bukan tidak beralasan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan transformasi peran Teungku Dayah terhadap keterlibatannya dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki dari hasil observasi dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan ketika penulis melakukan penelitian dapat penulis klasifikasikan menjadi tiga yaitu; Terbukanya demokrasi lokal di Aceh, Formalisasi Syari'at Islam, dan Teungku Dayah sebagai *Elite* di Aceh.
2. Sebenarnya bila merujuk sejarah awal Islam, tidak ditemukan adanya pemisahan antara *social religious* dengan *social politic*. Justru keduanya berkorelasi dan saling melengkapi mengawal umat agar meraih kehidupan lebih baik dan bermartabat, Keterlibatan Teungku Dayah dalam perpolitikan Aceh pasca perdamaian Helsinki merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena ini merupakan hak semua orang. Teungku Dayah sebagai suatu kelompok yang masih sangat dihormati dalam masyarakat Aceh keterlibatannya dalam politik tak lain untuk membangun bangsa dan ummat, membela dan

memperjuangkan nasib rakyat, menciptakan keadilan dan kemakmuran, serta mengangkat martabat Aceh melalui konsep syari'ah.

3. Al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah fundamen (*ashlu*) dan kekuatan politik adalah penjaganya. Untuk menjaga agama dari kehancuran maka dibutuhkan suatu kekuatan politik, kekuatan politik takkan mampu menjaga agama kalau tidak diisi oleh orang-orang yang memahami agama. Landasan inilah yang diambil kelompok Teungku Dayah untuk terjun dalam ranah politik. Demi menjaga Aceh dari segala ancaman politik global dan menjadikan Aceh tetap terjaga dengan sebutan serambi Mekkah sepanjang masa.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan menganalisis apa yang terjadi di lapangan, maka dapat diberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat dan Pembaca:

- Semua pihak harus sadar bahwa Perdamaian Helsinki adalah pintu menuju Aceh yang damai, adil, aman, dan bermartabat, sehingga semua pihak punya tanggung jawab dalam menjaga perdamaian di Aceh tetap abadi, mereka-mereka yang ingin mengacaukan dan merusak perdamaian ini adalah musuh yang harus diperangi bersama.
- Semua pihak harus sepakat bahwa pelaksanaan syari'at Islam (SI) merupakan jalan yang terbaik dalam menjawab persoalan rakyat Aceh,

dan tidak membatasi gerak kelompok manapun dalam implementasinya termasuk kelompok Teungku Dayah.

- Untuk Teungku Dayah yang sekarang sudah menjadi anggota dewan, seyogyanya selalu membela kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi, dan di tengah-tengah kesibukannya dalam pemerintahan sebisa mungkin tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya terhadap eksistensi Dayah yang di pegangnya.
- Bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian khususnya tentang peran ulama dan Teungku Dayah dalam politik, memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melihat sebuah permasalahan, hal seperti ini dibutuhkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan analisis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Fiqih

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987

Alfian, Ibrahim, *Perang Di Jalan ALLAH 1873-1912*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987

Al-Ghazzali, *Ihya ulum al-Din*, Universitas Michigan: 1933

Arifa Pentania Rini, *Peran Kiai Dalam Politik di Kabupaten Sumenep Perspektif fiqh Siyasah*, Yogyakarta: skripsi Universitas Sunan Kalijaga tahun 2005

Jurdy, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Khameini, *Kasyf al-Asrar (Mengungkap Rahasia)*, 1941

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991

Weber, Max, *The Sociologi of Religion*, USA : beacon press, 1993

### Kelompok Politik

Agus budi W, "Suara ulama dalam pilkada di aceh" [http:// agusbwaceh.blogspot.com/2009/01/.html](http://agusbwaceh.blogspot.com/2009/01/.html)

Amiruddin, M. Hasbi, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, Yogyakarta: Ceninnets Press, 2004

- - - -, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Aceh: Yayasan Nadiya, 2007

Anjar Nugroho, "Kekuasaan Legislative Dalam Pemikiran Politik Islam", <http://pemikiranislam.wordpress.com>

Armia Nirzalin, *Krisis Legitimasi Kekuasaan Politik Elit Agama Lokal, Studi Terhadap Teungku Dayah di Aceh Pasca Penerapan Syari'at Islam Tahun 1999-2007*, Yogyakarta: Proposal Desertasi Doktor Universitas Gajah Mada, 2007

Berita Koran Serambi Indonesia, “Kesepakatan Gubernur dan Ulama: Sebutan Pesantren Akan Diganti dengan Dayah”, Edisi Senin, tanggal 26 April 2010

Bottomore T.B., *Elite dan Masyarakat*, Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006

Dimiyati Akhmad, *Kontribusi Kiai Krapyak Terhadap Partai Politik*, Yogyakarta: skripsi Universitas Sunan Kalijaga, 2007

Faisal Naidi, *Perubahan Sikap Politik Pemerintah RI dan GAM Pasca Tsunami di Aceh*, Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 2006

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta: PT. Cita Panca Serangkai, 1993

Hasjmy Ali, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Hasyim, M.K., CS., *Himponan Hadih Madja*, Aceh: Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

Hayatullah Khumaini, “Harapan Baru Aceh Di Pemilu 2009,” <http://id.acehinstitute.org/index.php>

Ibrahimi, El M. Nur, *Teungku Daud Beureueh, Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1982

Irham Sya’roni, “Polemik Kiai Berpolitik”, <http://www.arwaniyyah.com/page/index.php?>

Iskandar, Heri, *Namaku Ibrahim Hasan, Menebah Tantangan Zaman*, Jakarta; Yayasan Malem Putera, 2003

Kholili Hasib, “Pemikiran Politik Imam Al-Ghazali”, <http://fajrulislam.wordpress.com>,

Lancaster, James, *The Voyage of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies*, London: The Hakluyt Society

Mahmud, Anas, *Aceh Tidak Pernah Menyerahkan Kedaulatannya Kepada Belanda*, Banda Aceh: Sabena Press

Partai Daulat Aceh,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_Daulat\\_Aceh](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Daulat_Aceh)

Partai Peserta Pemilu 2009, <http://pemilu.indonesia-ottawa.org/partai.php>

PDA dukung JK dan SBY <http://acehlong.com/2009/06/12/partai-daulat-aceh-dukung-jk-dan-sby/>



Pidato Gubernur Kepala Pemerintah Aceh pada Sambutan Acara Pelantikan/ Peresmian Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), tanggal 30 Juli 2008.

Reid, Anthony, *Asal-mula Konflik Aceh, dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Jakarta: Obor, 2005

Salah, Hasan, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Graffiti, 1992

Tim Sosialisasi Pusat, *Materi Sosialisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI Dan GAM*, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta: Juni, 2006

Ulama Aceh Dukung SBY <http://www.acehforum.or.id/showthread.php?22488-Ulama-Aceh-dukung-SBY>

### **Kelompok Sejarah**

Ali, Abdullah dkk, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1985

Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh, Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006

Lukman, Age (Eds), *Menjaring hari Tanpa Air Mata, Catatan Peristiwa Kekerasan di Aceh Sepanjang Tahun 1999*, Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2000

Muhammad Nazar (Wakil Gubernur Provinsi Aceh), "Sejarah Konflik Aceh Perspektif Pemerintah Aceh" <http://www.acehprov.go.id/>

Sulaiman, M. Isa, *Sejarah Aceh : Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1997

### **Kelompok Antropologi**

Abdullah, Irwan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*, Jakarta: DPPM Dirjen Dikti, 2003

Dr. Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia," <http://alip-sragen.blogspot.com/>

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Proyayi Dalam Masyarakat Jawa: Terjemahan oleh Aswab Mahasin*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981

Hurgeonje, C. snouck, *De Atjeher, deel I en II*, di terjemahkan dalam bahasa indonesia dengan judul “ Aceh di mata kolonialis oleh Ng, Singarimbun dkk, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985

Kartini Sartono 1982 hal 6, dalam “Peran Teungku Dayah di masyarakat Aceh “ <http://hardiansyah85.wordpress.com>,

Said, Mohammad, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Waspada, 1981

### **Kelompok Undang-Undang**

Butir-butir Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM, pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang penyelenggaraan syari’at Islam (SI)

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Nota kesepahaman antara RI dan GAM yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia menjadi *entry point* untuk mencapai Aceh yang aman, damai, adil dan sejahtera. Agar perdamaian ini bisa terus berlanjut, tentunya pengawalan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. dalam hal ini, apa saja usaha-usaha yang dilakukan kalangan *dayah* dalam menjaga perdamaian ?
2. Menurut Bapak/Saudara, peran-peran apa saja yang diambil *teungku dayah* di Aceh Pasca Perdamaian Helsinki?
3. Bagaimana pendapat Bapak/ Saudara terhadap keterlibatan *teungku dayah* dalam politik praktis di Aceh pasca Perdamaian Helsinki ?
4. Perdamaian Helsinki membuka ruang lahirnya partai lokal di Aceh, bagaimana pandangan Bapak/ Saudara dengan hadirnya Partai Daulat Aceh (PDA) sebagai salah satu partai yang berbasis *dayah* menjadi peserta pada pemilu legislatif Aceh 2009 ?
5. Menurut Bapak/Saudara, apa yang melatarbelakangi hadirnya Partai Daulat Aceh (PDA) sebagai salah satu partai lokal pada pemilu legislatif Aceh 2009 ?
6. Menurut pengetahuan Bapak/ Saudara, faktor-faktor apa saja yang mendorong sebagian *teungku dayah* tersebut terjun dalam politik praktis dan apabila bapak salah satu orangnya, Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Bapak/ Saudara terjun dalam dunia ini?
7. Anggapan banyak orang dunia politik identik dengan sesuatu hal yang “kotor”, apakah tidak ada kekhawatiran pada diri Bapak/ Saudara dengan keterlibatannya dalam politik praktis akan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada seorang *teungku* yang sejauh ini dinilai sebagai sosok yang mempunyai kharisma ?
8. Dengan adanya kalangan *teungku dayah* dalam parlemen Aceh, sejauh mana/ apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan khususnya *dayah* di Aceh saat ini?

## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI:

Nama : Jenius Khadafi  
Tetala : Aceh Besar, 27 Agustus 1986  
Alamat  
Asal : Jl. Pemuda No. 65 Desa Seumet, Kec. Montasik, Kab. Aceh  
Besar, Prov. Aceh  
Jogja : Asrama Mahasiswa Aceh "SABENA", Jl. Taman Siswa No. 13  
Wirogunan, Kec. Mergangsan, Yogyakarta.  
Nama Ayah : Drs. Nasrullah IBA.  
Nama Ibu : Harsuni, S.Pd.  
No Hp : 085260609030  
E\_mail & FB : dafi\_sabena@yahoo.co.id  
Motto : *"Aku tak sekalipun mau memikirkan apa yang tidak pernah aku inginkan, tapi aku selalu siap untuk menghadapi apa yang tidak pernah aku pikirkan"*

### PENDIDIKAN FORMAL:

- ❖ SDN Seumet, Kec. Montasik Aceh Besar 1992-1998
- ❖ MTsS Dayah Tgk. Chiek Oemar Diyan, Aceh Besar 1998-2001
- ❖ MAS Dayah Tgk. Chiek Oemar Diyan, Aceh Besar 2001-2004
- ❖ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004-2010

### PENGALAMAN ORGANISASI :

- Ketua Umum Keluarga Aceh Besar Yogyakarta (KABY) Periode 2009-2010
- Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta Sebagai Dewan Perwakilan Periode 2010-2011

- Pemuda Indonesia Abad ke-2 Kebangkitan Nasional (PIA2KN) Sebagai Presidium Kepulauan Sumatera, 2008- Sekarang.
- Koordinator Divisi Arung Jeram, Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga (MAPALASKA) Periode 2007-2009.
- Bendahara Umum Asrama Mahasiswa Aceh “SABENA” Periode 2006-2009
- Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh (KYPA) Sebagai Koordinator Posko pada bantuan korban gempa jogja 2006
- Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPMD) Indonesia Yogyakarta